**Modul 3**

**HAKIKAT MULTIKULTURAL**

Setelah kita membahas pada modul sebelumnya terkait tentang hakikat kebudayaan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebudayaan begitu banyak memiliki pengertian. Kebudayaan merupakan sebuah gagasan, perilaku, dan juga hasil karya manusia yang terbentuk dari suatu kelompok sosial tertentu yang telah melekat pada kelompok sosial itu. Maka, pada modul kedua ini kita akan sama-sama membahasan mengenai hakiat multikultural. Sehingga, setelah kita memahami makna multikultural, kita dapat dengan mudah mempelajari pendidikan multikultural.

**Pengertian Multikultual**

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Seara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengertian kebudayaan di antara para ahli harus dipersamakan atau, setidak-tidaknya, tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunya oleh ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.

Parsudi Suparlan melihat bahwa dalam perspektif tersebut, kebudayaan adalag sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus diperhatian bersama meyangkut kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu bekerja melalui pranata-pranata sosial. sebagai sebuah ide atau ideology, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kajian mengenai corak kegiatan interaksi sosial, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber daya, akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Masih menurut Parsudi Suparlan, bahwa salah satu isu yang cukup penting untuk diperhatikan dalam kajian mengenai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya adalah corak kebudayaan manajemen yang ada setempat, atau corak kebudayaan korporasi bila perhatian kajian tertelak pada kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya dalam sebuah korporasi.

Perhatian pada pengelolaan manajemen ini akan dapat menyikap dan mengungkapkan seperti apa corak nilai-nilai budaya dan operasionalisasi nilai-nilai budaya (etos) tersebut dalam pengelolaan manajemen yang dikaji. Kajian seperti ini juga akan dapat menyingkap dan mengungkapkan seperti apa corak etika (ethics) yang ada dalam struktur-struktur kegiatan sesuatu pengelolaan manajemen memproses masukan (in-put) menjadi keluaran (out-put).

Apakah memang ada pedoman etika dalam setiap struktur manajemen, ataukah tidak ada pedoman etikanya, atau apakah pedoman etika itu ada yang ideal (yang dicita-citakan dan yang dipamerkan) dan yang actual (yang betul-betul digunakan dalam proses manajemen dan biasanya disembunyikan dari pengamatan umum)?

Permasalahan etika ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat. Negeri kita kaya araya akan sumber daya alam dan kaya akan sumber daya manusia yang berkualitas. Tetapi, pada masa sekarang ini kita, bangsa Indonesia, tergolong sebagai bangsa yang paling miskin di dunia dan tergolong ke dalam bangsa-bangsa yang negaranya paling korup. Salah satu sebab utamanya adalah karena kita tidak mempunyai pedoman etika dalam mengelola sumber daya yang kita punyai.

Pedoman etika yang menjamin proses manajemen tersebut akan menjamin mutu yang dihasilkannya. Kajian seperti ini bukan hanya akan menyingkap dan mengungkap ada tidaknya dana tau bercorak seperti apakah nilai-nilai budaya yang berlaki dan etika yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan manajemen sesuatu kegiatan, organisasi, lembaga, atau pranata, selain itu, kajian ini juga akan mampu memberikan pemecahan yang terbaik mengenai pedoman etika yang seharusnya digunakan menurut dan sesuai dengan konteks macam kegiatan dan organisasi.

Secara garis besarnya, etika (ethics) dapat dilihat sebagai ‘pedoman yang berisikan aturan-aturan baku yang mengatur tindakan-tindakan pelaku dalam sebuah profesi, yang di dalam pedoman tersebut terserap prinsip-prinsip moral dan niali-nilai yang mendukung dan menjamin dilakukannya kegiatan profesi si pelaku sebagaimana seharusnya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sehingga, peranannya dalam sesuatu struktur kegiatan adalah fungsional dalam memproses masukan menjadi keluaran yang bermutu (K. Bertens 2001, Magnis-Suseno 1987).

Dalam ruang lingkup luas, yakni dalam masyarakat-masyarakat maju, kita kenal adanya istilah etika politik, etika akademik, etika bisnis, etika administrasi dan birokrasi, dan sebagainya. Sementara dalam ruang lingkup yang lebih kecil, kita bisa melihat berbagai pedoman etika yang ada dan atau tidak ada dalam berbagai struktur kehidupan atau pengelolaan sumber daya yang lebih khusus. Misalnya, pembahasan mengenai “Akbar Tanjung dan Etika Politik” sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Alfian M (2002).

Dalam kaitannya dengan masalah multikulturalisme, Masdar Hilmy berpandangan, bahwa bagi bangsa Indonesia, adanya keragaman budaya merupakan kenyataan sosial yang sudah niscaya. Meski demikian, hal itu tidak secara otomatis diiringi dengan penerimaan yang positif pula. Bahkan, banyak fakta yang justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya: keragaman budaya telah memberi sumbangan terbedar bagi munculnya ketegangan dan konflik. Sehingga, tek pelak modal sosial (social capital) itu justru menjadi kontraproduktif bagi penciptaan tatanan kehidupan berbangsa yang damai, harmoni dan toleran. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran multikulturalisme agar potensi positif yang terkandung dalam keragaman tersebut dapat teraktualisasi secara benar dan tepat.

Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme dimaksud. Karena, dalam tataran ideal, pendidikan seharusnya bisa berperan sebagai ‘juru bicara’ bagi terciptanya fundamen kehidupan multikultural yang terbebas dari kooptasi negara. Hal itu dapat berlangsung apabila ada perubahan paradigma dalam pendidikan, yakni dimulai dari penyeragaman menuju identitas tunggal, lalu kea rah pengakuan dan penghargaan keragaman identitas dalam kerangka penciptaan harmonisasi kehidupan.

Selanjutnya, harus diakui bahwa multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyrakat sebagai suatu yang given, takdir Tuhan, dan buka faktir bentukan manusia. Memang, masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, tetapi nalar kolektif masyrakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, dan tata cara ritual yang berbeda.

Nalar kolektif masyarakat tentang multikulturalitas kebangsaan masih terkooptasi oleh logosentrisme tafsir hegemonic yang syarat akan prasangka, kecurigaan, bisa kebencian, dan reduksi terhadap kelompok yang berada di luar dirinya (the other). Akibatnya, ikatan-ikatan sosial (societal bond) melalui kolektivitas dan kerjasama hanya berlaku di dalam kelompoknya sendiri (in group), tidak berlaku bagi kelompok lain (the other).

Kondisi multikulturalitas kebangsaan bisa diibaratkan sebagai pedang bermata ganda: di satu sisi, ia merupakan modalitas yang bisa menghasilkan energy positif; tetapi, di sisi lain, manakala keanekaragaman tersebut tidak bisa di kelola dengan baik, ia bisa menjadi ledakan destruktif yang bisa menghancurkan struktur dan pilar-pilar kebangsaan (disintegrasi bangsa). Sejarah peradaban bangsa-bangsa besar, Amerika Dan Kanada misalnya, adalah sejarah keberhasilan mengelola dan me-manage multikulturalitas kebangsaannya. Konsep melting pot society, yang di dalamnya mengandaikan terjadinya peleburan berbagai elemen sosial budaya ke dalam sebuah ‘campuran homogen’ (homogeny amalgama), menjadi pijakan konseptual praktis dalam membangun masyarakat multikultural itu.

Sebenarnya, Indonesia memiliki track record yang tidak terlalu jelek dalam pengelolaan keanekaragaman sosial budaya. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia selalu diwarnai oleh sikap toleransi dan asimilasi. Kedatangan unsur-unsur baru dalam kehidupan masyarakat hampir tidak menemui gesekan sosial yang berarti. Masyarakat tidak sekadar mudah beradaptasi terhadap nilai-nilai baru itu, tetapi juga berhasil mengadopsinya ke dalam struktur sosial budaya mereka.

Hal ini dibuktikan, misalnya, oleh kenyataan sejarah betapa masyarakat Jawa sangat mudah menggabungkan dua atau lebih sistem nilai yang berbeda yang kemudian turut membentuk mengolah peradaban Jawa menjadi indic. Sehingga tidaklah mengherankan bila candi Hindu dan Buddha berdiri saling berdampingan, dan raja-raja Jawa disebut sebagai ‘Siwa-Buddha’ sebagai wujud representasi dialog dua peradaban Hindu Buddha. Kehidupan toleransi semacam ini telah berlangsung di Jawa selama kurang lebih satu millennium sebelum kemudian nilai-nilai Islam turun mewarnai kehidupan sosial-kultural masyarakat Jawa pada abad ke-14.

**Akar Sejarah Multikulturalisme**

Secara historis, sejak jatuhnya presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudia diikuti dengan masa yang disebut sebagai “era reformasi”, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Azumardi Azra, bahwa krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultiral di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (fabric of society) tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat.

Krisis budaya sosial yang meluas itu dapat diasaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita, misalnya: disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euphoria kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial (social temper) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama seperti terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku, Sulawesi Tengah, dan lain-lain.

Disorientasi, dislokasi atau krisis sosial-budaya di kalangan masyarakat kita semakin merebak seiring dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat - khususnya Amerika - sebagai akibat proses globalisasi yang terus tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenatnya ‘alien’ (asing), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita, semakin menyebar dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan “gaya hidup” baru yang tidak sesuai dengan kondusif bagi kehidupan sosai lbudaya masyarakat dan bangsa (cf. al-Roubaie, 2002).

Hal ini busa dilihat misalnya, dari semakin merebaknya budaya McDonald, juga makanan instan lainnya dan dengan demikian budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang menyebarkan permisivisme, kekerasan dan hedonism; mewabahnya MTVisasi, Valentine’s day dan kini juga pub night di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak lain daripada “cultural imperialism” baru, yang menggantikan imperialism klasik yang terkandung dalam “Orientalisme”.

Dari berbagai kecenderungan ini, orang bisa menyaksikan kemunculan kultur hybrid, budaya gado-gado tanpa identitas, di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid tampaknya tidak terelakkan, khususnya karena proses globalisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi, pada segi lain, budaya hybrid – apalagi yang bersumber dari dan didominasi oleh budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka – dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih lanjut. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultiral nasional dan lokal, padahal identitas nasional dan lokal tersebut mutlak diperlukan bagi terwujudnya integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa Indonesia.

Pluralisme kultural di Asia Tenggaran, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura sebagaimana dikemukakan Hefner (2001: 4), sangatlah mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini – khususnya Indonesia – dipandang sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/plural” (plural society) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnivall (1944, 1948). Teori Furnivall ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relative “homogen”, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama, dan gender. berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944: 468-9).

Meski demikian, berbeda dengan “doomed scenario” Furnivall, masyarakat-masyarakat plural Asia Tenfaram khususnya Indonesia, pada akhirnya setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam kesatuan politik tunggal. Tetapi, harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukannya tidak sangat divisive, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan “common platform” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Padahala, pada saat yang sama, kemerdekaan yang dicapai negara-negara baru ini mendorong bangkitnya sentiment etno-relijius yang dapat sangat eksplosif, karena didorong semangat yang menyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan (Geerts 1973).

Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya memepertahankan kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara-bangsa (nation building) yang mengandung keragaman tersebut, maka para pengusaha negara-negara baru ini memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” (monokulturalisme atau monoculturality). Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan – khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno – dan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada penerapan politik monikulturalisme.

Secara restrospektif, politik mono-kulturalisme atau monokulturalitas yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentalism telah menghancurkan local cultural geniuses, seperti tadisi “pela gadong” di Ambon, “republik nigari” di Sumatera Barat dan lain-lain. Padahal, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai harganya bukan hanya bagi masyarakat sendiri, tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat lain.

Lebih jauh lagi, local geniuses juga berfungsi sebagai defense mechanism dan sekaligus early warning system yang dapat mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan tradisi dan sistem sosio-kultural dan, dengan demikian, memelihara intergrasi dan leutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Politik mono-kulturalisme yang telah menghancurkan local genius ini pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama yang marak sejak tahun 1996 tidak terlepas dari hancurnya local geniuses tersebut.

Tetapi penting dicatat, dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya senralisme kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan “mono-kulturalisme”, monokulturalisme, keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung sejumlah implikasi negative bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multu-kultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali, akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial-kultural lebih lankut, bahkan juga disintegrasi politik.

Sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kenyataan sulit diingkari, bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Realitas Indonesia seperti itu cocok dengan definisi Parekh (1997: 167) bahwa, “just a society with several religion or languages is multi religion or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural”. Karena itu, sekali lagi, sebagaimana dirumuskan Parekh, bahwa: “a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, systems of meaning, values, forms of meaning, values, forms of social organization, histories, customs, and practices.”

Menurut analisis Muhaemin el-Ma’hady, akar sejarah multikulturalisme bisa dilacak secara historis, bahwa sedikitnya selama tiga dasa warsa kebijakan yang sentralitis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya perbedaan secara terbuka, rasional dan damai.

Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka antar kelompok menyangkut nilai-nilai multikulturalis masyarakat.

Dalam konteks global, setelah tragedi 11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politis identitas di dalam era reformasi menambah kompleksnya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia. Sejarah menunjukkan pemaknaan secara negative atas keragaman (pluralitas) telah melahirkan penderitaan panjang umat manusia. Pada saat ini, paling tidak telah terjadi 35 pertikaian besar antaretnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslovakia, Zaire hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India hingga Indonesia. Konflik panjang tersebut melibatkan sentimen etnis, ras, golongan dan juga agama.

Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Tetapi pada pihak lain, realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “integrating force” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Perbedaan budaya merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Sebagai contoh, dalam suatu kelompok ada orang yang bila diajak bicara (pendengar) dalam mengungkapkan perhatiannya cukup dengan mengangguk-anggukkan kepala sambil berkata “uh, huh”. Namun, dalam kelompok lain, untuk menyatakan persetujuan cukup dengan mengedipkan kedua matanya. Dalam beberapa budaya, individu-individu yang berstatus tinggi biasanya yang memprakarsai, sementara individu yang statusnya rendah hanya menerima saja; sementara, dalam budaya lain justru sebaiknya.

Beberapa psikolog menyatakan, bahwa budaya menunjukkan tingkat inteligensi masyarakat. Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. Pertama, pandangan kaim primordialis. Kelompok ini menganggap bahwa perbedaan genetika, seperti suku dan ras (juga agama), merupakan sumber utama lahirnya benturan kepentingan etnis dan agama.

Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas lain yang dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan “Islam”, misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-bacu up kepentingan politiknya. Oleh karen itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setuap orang mau mengalah dari prefence yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari, bahkan tidak terjadi.

Ketiga, pandangan kaun konstruktivis, beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum promordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.

Dalam pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman. Wacana ini mulai ramai dibicarakan di kalangan akademisi, praktis budaya dan aktifis di awa tahun 2000 di Indonesia.

Pada hakikatnya, diskusi tentang multikulturalisme belum sepenuhnya tuntas hingga detik ini. Sampai saat ini, definisi yang diberikan oleh ilmuwan sosial belum representative. Irwan Abdullah mengatakan dalam symposium antropologi internasional di Bali, sebagaimana di lansir Kompas, bahwap pengertian yang pasti didiskusikan, sehingga ditemukan bentuk terbaiknya.

Menurut Irwan, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaran budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulyuralisme adalah kesetaraan budaya.

Pada pertengahan 2002, sebuah jurnal antropologi mengadalan simposium internasional yang bertemakan mengadakan symposium internasional yang bertemakan “Mmebangung Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural”. Symposium ini menghasilkan konsep penting, bahwa keragaman dalam sebuah komunitas bedar (bangsa) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan. Sebagaimana dikatakan Gus Dur, kebudayaan sebuah bangsa pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluralistic.

Sebuah bangsa tidak akan berkembang apabila tingkat pluralitasnya kecil. Begitu pula dengan sebuah bangsa yang besar jumlah perbedaan kebudayaannya, akan menjadi kerdil apabila ditekan secara institusional. Bahkan, tindakan semacam itu akan merusakan nilai-nilai yang ada dalam budaya itu sendiri. Akibatnya, perpecahan dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarki menjadi sebuah sikap alternative masyarakat ketika pengakuan identitas dirinya terhambat.

Berangkat dari kronologi pergulatan wacana tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya multikulturalisme adalah sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama dan lain sebagainya. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural). Dan bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cultural groups) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co existensi yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Gagasan multikulturalisme yang dinilai mengakomodir kesetaraan dalam perbedaan merupakan sebuah konsep yang mampu meredam konflik vertical dan horizontal dalam masyarakat yang heterogen di mana tuntutan akan pengakuan dan eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnis sangat lumrah terjadi. Masyarakat multikultural dicipatakan mampu memberikan ruang yang luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan secara otonom. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem budaya (culture system) dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa.